

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada era keterbukaan informasi publik dewasa ini, dituntut adanya akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik khususnya pemerintahan., baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Meningkatnya kuantitas dan kompleksitas transaksi keuangan pemerintah daerah sangat membutuhkan pelaporan keuangan yang berkualitas dan sejalan dengan tuntutan perubahan yang dikehendaki *stakeholder* dalam hal ini adalah masyarakat. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan suatu instansi. Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Laporan keuangan merupakan bentuk hasil dari suatu proses akuntansi yang berisikan informasi keuangan. Biasanya informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Dengan adanya laporan keuangan tersebut dapat memudahkan dalam menilai apakah pelaporan keuangan telah berjalan dengan sebaik mungkin dan juga dapat berguna bagi pihak pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan. Laporan keuangan tidak boleh berisi sesuatu yang menyesatkan karena dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan,

sehingga laporan keuangan yang telah disajikan harus berkualitas dan memenuhi karakteristik suatu laporan keuangan.

Laporan keuangan sangat diperlukan bagi suatu pemerintahan. Salah satu upaya untuk mewujudkan suatu pemerintah yang bersih, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah atau LKPD. Roman (2016) mengatakan bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang merupakan susunan siklus keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang berawal dari pencatatan akuntansi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas pelaporan. Dari pernyataan diatas, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti standar akuntansi pemerintah dan juga kompetensi sumber daya manusia.

Faktor yang mempengaruhi suatu kualitas laporan keuangan yang pertama adalah penerapan standar akuntansi pemerintah. Sebagaimana implementasi atas terselenggaranya pelaporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan perangkat yang berupa standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi yang mendukung pelaksanaan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Selain standar akuntansi pemerintah, faktor lainnya yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi merupakan ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan maupun pengetahuan dan juga kemampuan. Menurut (Yosefrinaldi, 2013) sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang baik dan optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu karyawan mempunyai sifat yang baik dan selalu jujur, maka akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas sehingga peran sumber daya manusia ini juga sangat mempengaruhi dalam sistematika kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Salah satu Kabupaten yang ada di lingkungan Provinsi Gorontalo yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa koreksi terkait dengan standar akuntansi pemerintah dan juga kompetensi sumber daya manusia adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.

Dalam pengelolaannya, Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo sudah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini berdasarkan wawancara langsung bersama Bapak Kepala Sub. Bidang Akuntansi yaitu Bapak Arman Mahmud, SE. Penerapan SAP No.

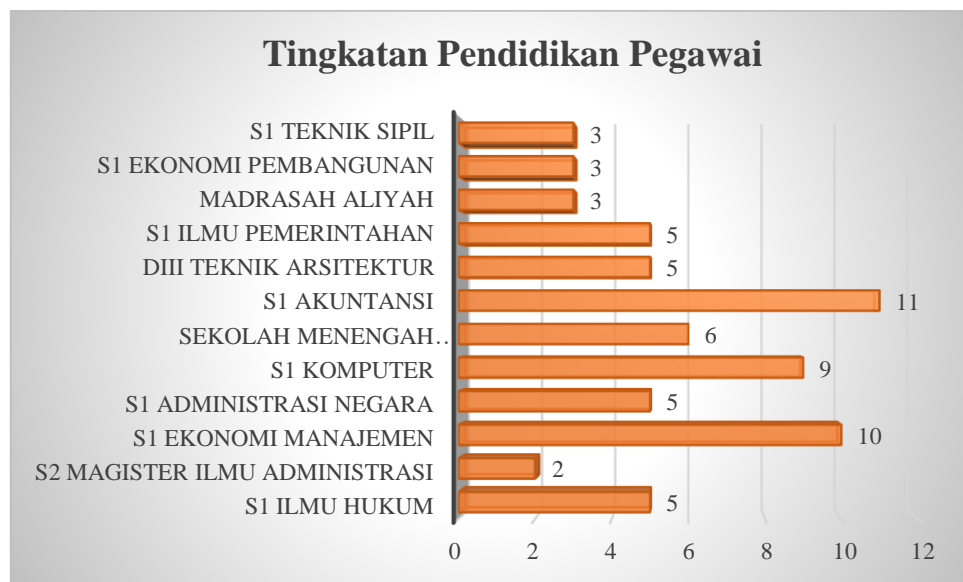
71 Tahun 2010 ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Sehingga tujuan dari laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan. Maka untuk itu laporan keuangan wajib disusun berdasarkan SAP yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dilihat dari laporan keuangan, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh kali berturut-turut. Namun masih ditemukan beberapa kasus dalam laporan keuangan tersebut, seperti :

1. Piutang daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 560.796.500,00 tidak tertagih dan belum dihapuskan
2. Pemotongan biaya-biaya KDN (Kompensasi Dampak Negatif) dan KJP (Kompensasi Jasa Pelayanan) Tempat Pembuangan Akhir sampah Talumelito sebesar Rp. 233.579.403,00 dari penerimaan dana bagi hasil dengan provinsi tidak sesuai ketentuan
3. Manajemen kas pemerintah Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

Selain pernyataan diatas, adapun kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo masih rendah dan sumber daya manusia pada instansi tersebut masih kurang kompeten. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual yang baru mulai digunakan pada tahun 2015. Sehingga dibutuhkan pembelajaran dan pelatihan untuk membantu para pegawai dalam

pengelolaan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dari para pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo. Berikut grafiknya :



**Grafik 1.1**  
**Tingkatan Pendidikan Pegawai**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

Dari hasil audit laporan keuangan diatas dan juga berdasarkan grafik yang telah dipaparkan diatas masih terdapat beberapa masalah mengenai sistem pencatatan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan juga dapat dilihat dari grafik, orang-orang yang berlatarbelakang ilmu akuntansi hanya sejumlah 11 orang. Maka bisa saja dapat mempengaruhi dan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti (2018) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh dampak penerapan standar akuntansi pemerintahan dan juga kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Siska Marini Pilander, David Paul Elia Saerang dan Gamaliel (2018) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Kotamobagu.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan baik itu yang bersifat pengulangan (*replikatif*) dan juga penelitian yang bersifat pengembangan. Penulis membedakan penelitian ini dengan penelitian Putriasri Pujanira (2017) dimana penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu variabel X1 standar akuntansi pemerintah dan juga X2 kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada data laporan keuangan pada tahun 2015.

Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis menarik sebuah judul yang sesuai dengan penelitian yaitu **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih terdapat beberapa data laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang tergolong masih baru diterapkan pada tahun 2015 sehingga masih menjadi kendala dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Masih terdapat beberapa pegawai keuangan yang belum memenuhi kompetensi sumber daya manusia. Sebagian besar para pegawai masih kurang dalam pemahaman mengenai akuntansi karena kebanyakan pegawai tidak termasuk lulusan akuntansi sehingga terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.



## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis semoga penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat dalam memahami akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk :

- a. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, sebagai bahan pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia.
- b. Bagi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan sekaligus bisa mengembangkan pemerintahan Kabupaten Gorontalo.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi wacana dan referensi bagi pihak yang memerlukan.